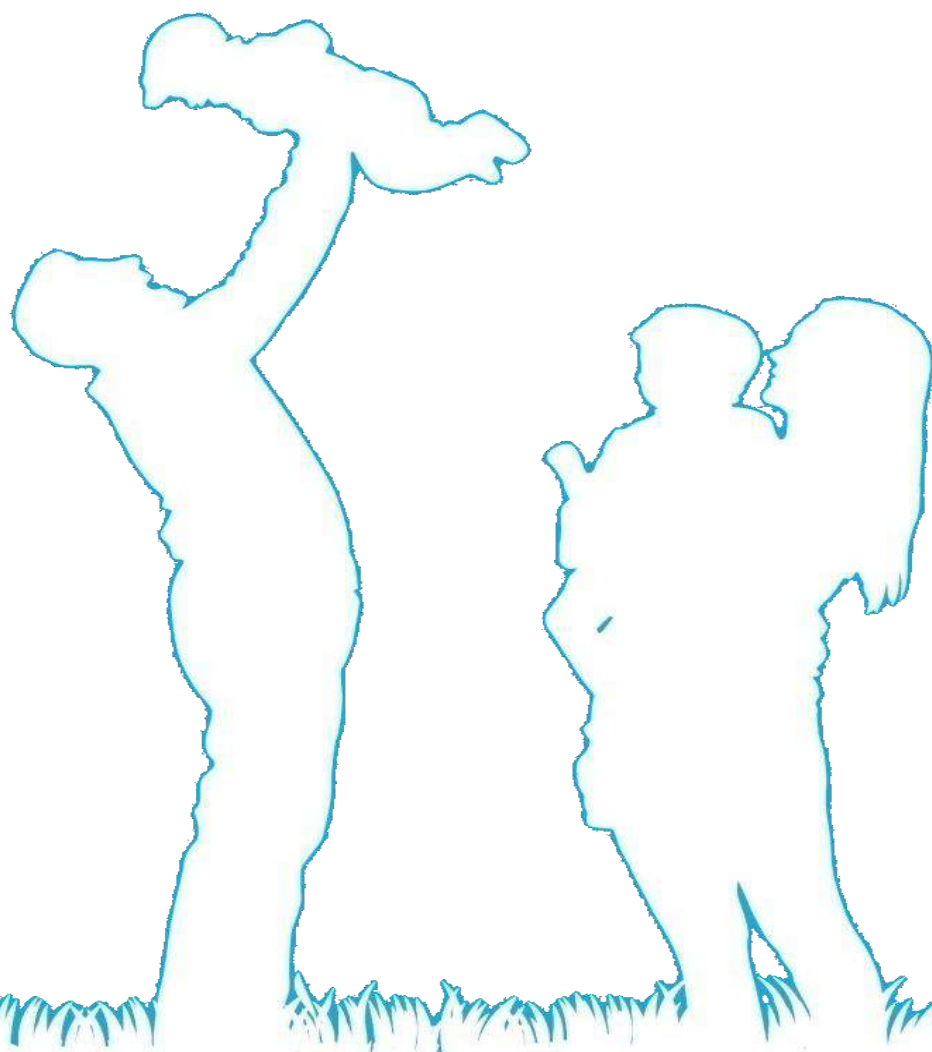




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga dengan Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat Perangkat Daerah. Penyusunan renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja-Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah 5 Tahun berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dan berpedoman kepada Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, khususnya lampiran II (Kedua) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dijelaskan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

RENCANA TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2019

Persiapan	Penyusunan Rancangan Renja	Forum Perangkat Daerah	Konsultasi Publik	Tahapan Penetapan Renja
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan SK 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah 3. Penyusunan Agenda 4. Pengumpulan Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah Mengacu Pada RKPD Provinsi Sulut Tahun 2019 dan Renstra DPP-PAD Prov. Sulut 2016-2021 2. Evaluasi Program dan Kegiatan 3. Identifikasi Masalah dan Pemecahaan masalah 4. Usulan Program/Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelarasan Program/Kegiatan 2. Penajaman Indikator dan Target Kinerja 3. Penyelarasan Program / Kegiatan antar Perangkat Daerah 4. Penyesuaian Pendanaan Program dan Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Program Prioritas Pembangunan 2. Masukan dan Pelibatan Partisipasi Masyarakat 3. Penyepakatan Program dan Kegiatan dengan Penandatngan Berita Acara Kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Rancangan Renja hasil Konsultasi Publik 2. Vervikasi Rancangan Renja Oleh Bappeda Provinsi Prov. Sulut 3. Pengesahan Gubernur Sulawesi Utara 4. Penetapan Kepala DPP-PAD Prov. Sulut

Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan Renja DPP-PAD Prov. Sulut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. **Tahapan persiapan** ; meliputi proses (1) pembentukan SK tim penyusun Renja (2) orientasi tim kerja (3) penyusunan agenda tim kerja (4) penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja DPP-PAD Provinsi Sulawesi Utara
- II. **Tahapan penyusunan Rancangan Renja DPP-PAD tahun 2019;** meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dan Renstra DPP-PAD Tahun 2016-2021 (2) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (3) memecahkan masalah yang sedang dihadapi (4) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- III. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.** Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi terkait, Perangkat

Daerah/Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan SPM BPP-PA, LSM Peduli/Pemerhati Gender, Perempuan dan Anak serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota. Adapun tujuan pelaksanaan forum Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kab/kota dan aspirasi masyarakat/LSM Peduli Perempuan dan Anak;
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan tentang rancangan awal RKPD.
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah nantinya dituangkan dalam berita acara kesepakatan forum Perangkat Daerah, berita acara forum Perangkat Daerah dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan renja Perangkat Daerah. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja Perangkat Daerah-Perangkat Daerah menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2019.

IV. Konsultasi Publik Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah DPP-PAD Prov. Sulut Tahun 2019

- a. Penyampaian Program Prioritas Pembangunan
- b. Masukan dan Pelibatan Partisipasi Masyarakat
- c. Penyepakatan Program dan Kegiatan dengan Penandatnganan Berita Acara Kesepakatan

V. Penetapan Renja Perangkat Daerah DPP-PAD Prov. Sulut Tahun 2019. Proses penetapan Renja DPP-PAD Prov. Sulut dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah DPP-PAD Prov. Sulut adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukanlah verifikasi terhadap renja Perangkat Daerah DPP-PAD Prov. Sulut oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah DPP-PAD sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 2014 melalui Keputusan Kepala DPP-PAD Prov. Sulut.

1.2. Landasan Hukum:

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
10. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (trafficking) terutama Perempuan dan Anak.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 69 Tahun 2017 tanggal 9 November 2017 Tentang Agenda Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2019;
20. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 050/323./Sekr-Bappeda tanggal 15 Pebruari 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019 (Rancangan Awal RKPD Tahun 2019).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja bermaksud untuk memberikan kejelasan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai alat pengukur dalam menilai kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPP-PAD Prov. Sulut Tahun 2019

2. Tujuan penyusunan RENJA adalah untuk terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan suatu sistem budaya birokrat yang akuntabel dan transparan.
3. Sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisn

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017;

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan unsur Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 yang adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan rencana program dan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja sebagai amanat RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 di tahun ke-3 serta penjabaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui alokasi APBD tahun anggaran 2017 dan dukungan sumberdaya yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, maka telah dilakukan beberapa program dan kegiatan yang meliputi 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6). Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 7). Program Perlindungan Hak Perempuan 8). Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 9). Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 10). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD dan APBN sebagai berikut :

Tabel Alokasi Dana APBD 2017

BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,745,122,026	4,610,015,878	97.15
BELANJA LANGSUNG	5,678,121,003	5,016,958,408	88.36
TOTAL BELANJA	10,423,243,029	9,626,974,286	92.36

Tabel Rincian Realisasi Anggaran APBD 2017

No	Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja	Realisasi			KET
		Masukan (Rp)	Keu (Rp)	(%)	Fisik	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	Belanja Administrasi Umum					
	- Gaji dan Tunjangan	2,783,873,448	2,791,292,306	100.27		
	- Tambahan Penghasilan PNS	1,961,248,578	1,818,723,572	92.73		
	JUMLAH B	4,745,122,026	4,610,015,878	97.15	100.00	
B	BELANJA LANGSUNG					
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- Penyediaan kebutuhan administrasi umum	255,912,600	208,454,328	81.46	100.00	
	- Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	112,605,000	108,083,750	95.98	100.00	
	- Penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa	52,252,800	50,798,500	97.22	100.00	
	- Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	18,991,400	17,296,250	91.07	100.00	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	184,483,000	167,758,960	90.93	100.00	
2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur					
	- Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	226,555,400	223,575,000	98.68	100.00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,910,000	12,989,480	81.64	100.00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	179,304,500	105,882,769	59.05	100.00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	19,750,000	17,765,000	89.95	100.00	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur					
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38,700,000	38,610,000	99.77	100.00	
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	33,000,000	32,670,000	99.00	100.00	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10,375,000	8,875,000	85.54	100.00	

	-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,227,000	8,875,000	29.36	100.00	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan						
	-	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,080,000	500,000	8.22	100.00	
	-	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3,700,050		0.00	100.00	
	-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,206,000	5,127,500	98.49	100.00	
6	Perencanaan SKPD						
	-	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	20,652,500	20,186,000	97.74	100.00	
	-	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	36,496,800	35,769,000	98.01	100.00	
	-	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	9,240,000	3,730,000	40.37	100.00	
7	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
	-	Pelatihan tentang Pengarustamaan Gender (PUG)	58,693,700	58,543,700	99.74	100.00	
	-	Evaluasi pelaksanaan PUG	50,948,000	50,948,000	100.00	100.00	
	-	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	237,684,500	237,684,500	100.00	100.00	
	-	Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	336,499,000	336,397,000	99.97	100.00	
	-	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	208,881,600	202,791,000	97.08	100.00	
	-	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	44,140,000	44,090,000	99.89	100.00	
	-	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	96,654,000	76,147,700	78.78	100.00	
	-	Kampanye Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarustamaan Gender (HeForShe)	107,538,800	107,338,800	99.81	100.00	
	-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	49,781,700	48,556,000	97.54	100.00	
	-	Training of Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG)	84,165,000	70,887,000	84.22	100.00	
8	Perlindungan Hak Perempuan						
	-	Dukungan Kegiatan Jambore Lansia	18,877,700	18,727,700	99.21	100.00	
	-	Pelatihan bagi SDM tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	38,119,200	38,119,200	100.00	100.00	
	-	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan dengan masalah sosial	46,465,400	46,465,400	100.00	100.00	
	-	Temu Karya Lansia	140,578,500	140,358,500	99.84	100.00	
	-	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang					Efisiensi
	-	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	70,005,800	45,355,694	64.79	100.00	
	-	Monitoring, evaluasi & pelaporan	50,026,900	48,692,300	97.33	100.00	
9	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak						

- a. **Penyusunan Rencana Strategis SKPD** telah dilakukan penyusunan 1 (satu) Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
- b. **Penyusunan Rencana Kerja SKPD** sebanyak 2 (dua) Dokumen yang terdiri dari Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- c. **Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;** sebanyak 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. **Pelatihan tentang Pengarustamaan Gender (PUG);** dengan Tersedianya SDM Terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG di berbagai bidang yang Dilaksanakan di Kab. Bolaang Mongondow Utara Kantor Camat Bolangitang Timur, dengan peserta sebanyak 100 Orang terdiri dari PD terkait dan Lembaga Masyarakat
- b. **Evaluasi pelaksanaan PUG;** dengan melibatkan semua Anggota Pokja PUG Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka persiapan penilaian APE 2018, dengan peserta sebanyak 80 orang..
- c. **Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;** yang Dilaksanakan di Kab. Sangihe, Minahasa, Minahasa Utara dan Kota Manado dengan peserta sebanyak 900 Orang Ibu Rumah Tangga
- d. **Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha** bagi perempuan dalam mengelola usaha; di laksanakan di 6 lokasi yaitu 3 kab/1kota dengan peserta perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin dan perempuan miskin yang produktif dalam kegiatan tersebut sekaligus diserahkan bantuan peralatan rumah tangga bagi 400 peserta di 5 lokasi yaitu : (1) Kabupaten Minahasa Utara di dua lokasi yaitu tanggal 5 Oktober 2017 di Kec. Airmadidi jumlah 60 peserta, tanggal 6 oktober di Kec. Likupang Timur 67 peserta, (2) Kabupaten Minahasa tanggal 10 Oktober 2017 berjumlah 80 peserta, tanggal 11 oktober 2017 berjumlah 113 peserta yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab . Minahasa, (3) Kota Manado tanggal 16 oktober di P2TP2A Sulut sebanyak 80 peserta. Kegiatan pelatihan tanggal 14 Oktober 2017

di Ranomuut sebanyak 75 peserta tidak mendapatkan bantuan peralatan rumah tangga.

- e. **Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan;** melalui 2 (dua) kegiatan yaitu keikutsertaan dalam rangka promosi hasil karya perempuan Sulut baik dalam Pameran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka HUT Provinsi Sulut dan Pameran Festival Nusantara Expo di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta bersama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut
- f. **Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);** yang Dilaksanakan Di Prov.Sulut, Hotel Grandpuri dengan 40 Orang Peserta Aparatur Perencana dari PD Terkait dan DP3AD Kabupaten/Kota
- g. **Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan;** yang diikuti oleh 130 peserta terdiri dari Kaukus perempuan parlemen, anggota partai politik perempuan, organisasi perempuan dan organisasi profesi yang dilaksanakan di Restoran Pirates Boulevard Manado.
- h. **Kampanye Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarusutamaan Gender (HeForShe);** pelaksanaan Kampanye Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarusutamaan Gender (HeForShe) (Bertempat di Lapangan KONI Sario dan Parkiran Mantos dengan peserta Jalan sehat dan Kampanye, senam three Ends, Tolk show, yang diikuti peserta sebanyak 750 Orang, yang terdiri dari Forkompinda Provinsi Sulut dan perangkat Daerah, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, LSM peduli perempuan dan Anak dll.
- i. **Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;** Melaksanakan monitoring, evaluasi sekaligus pengambilan bahan/data terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga di 15 kabupaten / Kota.
- j. **Training of Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG);** Dilaksanakan Hotel Grandpuri Manado yang diikuti 40 Orang Peserta ASN Perangkat Daerah Provinsi Sulut dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Perlindungan Hak Perempuan

- a. **Dukungan Kegiatan Jambore Lansia** ; Telah diberikan bantuan kepada 100 Lansia Perempuan pada acara Jambore Lansia yang dilaksanakan di Minahasa Tenggara
- b. **Pelatihan bagi SDM tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan** ; Pelatihan telah dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Maleosan yang diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari perwakilan DP3A 15 Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Prov. Sulut, Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut, Dinas Kesehatan Prov. Sulut, P2TP2A Prov. Sulut, KOMDA Sulut, TP-PKK Prov. Sulut, Swara Parampuang, BKOW, Pusat Kajian Gender (Unima & Unsrat), LM Djamilia, Komisi Penanggulangan Masalah Perempuan dan Anak Sinode GMIM, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulut, LPA Sulut
- c. **Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan dengan masalah sosial** ; Pelatihan telah dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Maleosan yang diikuti oleh 40 orang peserta
- d. **Temu Karya Lansia**; telah dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Maleosan yang diikuti oleh 360 orang peserta lansia yang produktif
- e. **Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO** ; telah dilaksanakan kegiatan rapat sebanyak 2 kali pertemuan yang dihadiri oleh Gugus Tugas TPPO
- f. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan** ; telah dilaksanakan perjalanan dinas di 15 Kabupaten/Kota dan telah menghasilkan 15 laporan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Perempuan Lanjut Usia.

4. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

- a. **Pelatihan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**; Terlatihnya 100 Orang yang terdiri dari Aparatur, Tokoh Masyarakat, Camat, Guru, Kelompok Perempuan dan Pemerhati anak, Orang tua, Forum anak, yang memahami Konvensi Hak Anak, memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu.
- b. **Pembentukan kabupaten/kota layak anak**; Terfasilitasinya Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kota Manado, untuk menjadi Kabupaten/ Kota Layak Anak dengan membahas 24 Indikator yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/ Kota dalam memperjuangkan penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak di

Tahun 2017, Peserta adalah SKPD terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Gugus Tugas, Pemerhati Anak.

- c. **Fasilitasi Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)**; Melalui dua kegiatan yang dilaksanakan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara, dengan peserta adalah SKPD dan Ilustrasi Vertikal yang terkait anak, kelompok Lembaga masyarakat, Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat dan Kelompok sahabat anak, berkomitmen bersama, bersinergi untuk melakukan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak ada di Kabupaten/ Kota.
- d. **Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**; Penyedia Layanan Informasi dan Layanan Konseling bagi anak, Orang tua/ wali yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang anak. Puspaga di layani oleh 2 Orang tenaga Psikolog anak dan satu tenaga Administrasi.
- e. **Monitoring, evaluasi & pelaporan**; Melakukan Monitoring dan Evaluasi di 15 Kabupaten/ Kota yang ada di sulut terkait dengan program dan kegiatan yang ada di 15 Kabupaten/ Kota. Tersedianya laporan tentang Perlindungan Anak di Kabupaten/ Kota
- f. **Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)**; Tersedianya tenaga terlatih sebanyak 75 Orang tentang Perlindungan Anak disetiap SKPD terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota se- Sulut. Para bidang Dokter terlatih tentang anak, Jaksa, Aparat Penegak Hukum dan LSM (Lembaga Penyedia Layanan yang peduli tentang anak). Kegiatan dilaksanakan di Gran Puri Hotel Manado.
- g. **Fasilitasi Forum Anak Daerah**; Terbentuk Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang jelas di legitimasi di Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Forum Anak Daerah Periode 2017-2019 yang terdiri dari utusan Forum Anak Daerah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Utara. Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapat kesempatan untuk mengikuti Forum Anak Nasional di Riau yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli setiap tahun.

- h. **Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah;** Pertemuan Utusan-Utusan kelompok Anak dengan menampilkan Kreatifitas, Kemampuan dan Talenta mereka seperti menyanyi, menari, melukis, koor, dan mendeklarasikan Suara Anak di Sulawesi Utara, yang diikuti juga oleh Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Forum Anak Daerah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Utara.

5. Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. **Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A);** mendukung Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mencakup kegiatan : Layanan Pengaduan, Rujukan Kesehatan, Bantuan Hukum dan Advokasi, Rujukan Rehabilitasi Sosial, dan Pemulangan selama 12 Bulan
- b. **Penguatan jejaring P2TP2A;** Terlaksananya Penguatan jejaring P2TP2A di P2TP2A Provinsi dengan peserta sebanyak 30 orang terdiri dari pengurus P2TP2A Provinsi, Tokoh Agama dan Lembaga Masyarakat Peduli perempuan dan anak.
- c. **Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking;** berjumlah 127 Kasus yang terdiri dari Korban Dewasa sebanyak 26 Orang dan Korban Anak sebanyak 101 Orang Anak dengan Jenis Kasus kekerasan yang ditangani meliputi KDRT, Kekerasan Seksual, Trafficking/Eksploitasi, Penelantaran, Kekerasan Psikis dan Kekerasan Fisik dengan rincian Jenis kekerasan sebagai berikut :

NO	JENIS KEKERASAN	DEWASA	ANAK	JUMLAH
1	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)			
	- FISIK	4	2	6
	- PSIKIS	3	5	8
	- SEKSUAL	1	7	8
	- PENELANTARAN	5	15	20
	- LAINNYA	1	10	11
	- PERAMPASAN HAK ASUH ANAK		5	
	- ANAK DILARANG BERTEMU ORANG TUA		5	
	- PERAMPASAN PENSIUN AYAH	1		
	- INGIN DIPERHATIKAN	0	0	
2	KEKERASAN DILUAR LINGKUP KELUARGA			
	- FISIK	2	8	10
	- PSIKIS	1	8	9
	- SEKSUAL	3	19	22
3	TRAFFICKING	10	9	19
4	LAINNYA	4	10	14
	- DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN		1	
	- LARI DARI RUMAH		4	
	- ANAK HILANG		2	
	- DISAYANGI (MAMA & KAKAK)		1	
	- PENGANCAMAN		1	
	- ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM		1	
	- PERAMPASAN PENSIUN	1		
	- PERAMPASAN HAK ASUH ANAK	3		
	JUMLAH			127

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- d. **Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Perempuan;** Pembinaan & Fasilitasi melalui : 1. Kegiatan Rakernas Dharma Wanita, 2. Seminar Nasional (BKOW), 3. Rakon Organisasi ke Pusat, 4. Capacity Building, 5. Peringatan Hari Ibu, 6. Rakon BKOW
- e. **Updating Data Gender dan Anak;** Kegiatan dalam bentuk : Rapat Koordinasi dengan Dinas PP-PA Kabupaten/Kota, Instansi terkait kebutuhan data yang diperlukan dalam Pembuatan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sulawesi Utara dan Rancangan Pembuatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi Sulut guna Kebutuhan Data yang akan dikonsumsi Pimpinan
- f. **Kerjasama dengan Dunia Usaha;** Kegiatan dalam bentuk : 1. Membangun Komitmen dan Kerjasama dengan Dunia Usaha; 2. Memperkenalkan Urusan serta Program Dinas PP-PAD Prov.Sulut pada Dunia Usaha; 3. Sinkronisasi Program dan Kontribusi dunia usaha untuk menunjang/mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Misalnya : Menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung peran pekerja perempuan sebagai ibu dalam menyediakan ruang laktasi, kulkas penyimpanan asi, tempat penitipan anak (TPA), dan mengembangkan kebijakan yang memberikan dispensasi waktu bagi karyawan yang memiliki bayi dibawah usia 6 bulan untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.
- g. **Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;** Kegiatan dalam bentuk : 1. Koordinasi terkait

Singkronisasi dan Sinergitas Program antara Dinas PP-PA Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Sinergitas Program Lintas SKPD

- h. **Monitoring, evaluasi & pelaporan;** Pengumpulan data Kekerasan yang ada pada unit/lembaga layanan pengaduan dan Instansi Dinas PP-PA yang ada di Kabupaten/Kota, Data Gender/Anak, serta Evaluasi Pengolahan data / Kinerja masing masing unit/lembaga
- i. **Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;** Kegiatan dalam bentuk : Fasilitasi bagi Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Tomas, Toga, yang tergabung dalam Forum PP-PA dengan SK Gubernur untuk secara bersinergi, bersatu, membantu, menunjang Program/Kegiatan Dinas PP-PA dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang bebas dari Diskriminasi, Kekerasan, dan Ekonomi Lemah

Tabel Realisasi Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun 2017

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja			Sisa Anggaran
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
1	Pendampingan Teknis Penyelarasn Penyusunan Renstra Dinas PP-PP Provinsi dan Kabupaten/Kota	113,050,000	113,050,000	100.00	100	-
2	Workshop dan Penyelarasn Renstra Dinas PP-Provinsi dan Kabupaten/Kota ; 2 kali kegiatan Penyusunan dan Review serta Penyelarasn selama 3 hari	523,526,000	519,045,700	99.14	100	4,480,300
3	Fasilitasi Verifikasi Rencana Strategis (2 Hari)	93,016,000	88,989,000	95.67	100	4,027,000
4	Surveillance ISO 9001:2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	53,228,000	49,816,900	93.59	100	3,411,100
5	Fasilitasi Operasional Pengelolaan SIGA di Daerah	96,700,000	91,270,500	94.39	100	5,429,500
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Simfoni PP (Peserta 40 Orang kali 3 hari)	360,104,000	356,440,022	98.98	100	3,663,978
7	Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) (selama 4 Hari)	172,675,000	169,625,400	98.23	100	3,049,600

8	Pembentukan Forum PUSPA di Daerah	152,965,000	149,254,900	97.57	100	3,710,100
9	Fasilitasi Koordinasi Dukungan Satgas PPA Propinsi	152,050,000	151,449,695	99.61	100	600,305
10	Kampanye BERLIAN - Stop Kekerasan	188,630,000	187,230,000	99.26	100	1,400,000
11	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	38,256,000	38,256,000	100.00	100	-
12	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	185,790,000	185,390,000	99.78	100	400,000
13	Layanan Operasional Dana Dekonsentrasi	230,010,000	228,981,000	99.55	100	1,029,000
	Total Anggaran	2,360,000,000	2,328,799,117	98.68	100.00	31,200,883

- Pendampingan Teknis Penyelerasan Penyusunan Renstra Dinas PP-PP Provinsi dan Kabupaten/Kota** dengan sasaran yaitu Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan PP-PA dengan outputnya adalah Meningkatnya Pemahaman Aparatur Perencana dalam Penyusunan Dokumen Renstra
- Workshop dan Penyelarasn Renstra Dinas PP-Provinsi dan Kabupaten/Kota ; 2 kali kegiatan Penyusunan dan Review serta Penyelarasn selama 3 hari** dengan sasaran yaitu Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan PP-PA dengan ouputnya adalah Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah (Prop/Kab/Kota) sesuai kondisi masing-masing OPD.
- Fasilitasi Verifikasi Rencana Strategis (2 Hari)** dengan sasaran yaitu Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan PP-PA dengan ouputnya adalah Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah (Prop/Kab/Kota) sesuai kondisi masing-masing OPD.
- Surveillance ISO 9001:2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)** dengan sasaran P2TP2A yang pada tahun 2016 lalu telah mendapatkan ISO 9001:2015 ouputnya adalah ISO 9001:2015 yang telah diperoleh TETAP disandang oleh P2TP2A.
- Fasilitasi Operasional Pengelolaan SIGA di Daerah;** dengan sasaran Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak di Daerah outputnya adalah terlatihnya Sumberdaya Manusia Tim Admin Satgas yang mengikuti Pelatihan di Jakarta (fasilitator SIGA Di daerah)
- Fasilitasi Penyelenggaraan Simfoni PP (Peserta 40 Orang kali 3 hari);** dengan sasaran Unit/penanggungjawab Data pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan PP-PA dengan ouput terlatihnya tenaga dan operator data SIMFONi dengan tersedianya Data Kekerasan 2017
- Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) (selama 4 Hari);** dengan sasaran SDM para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan isu anak ;

outputnya Peserta terlatih yang mampu melakukan tindak lanjut dari pelatihan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait penguatan sistem perlindungan anak;

8. **Pembentukan Forum PUSPA di Daerah;** dengan sasaran Lembaga masyarakat dan dunia usaha di daerah dengan outputnya yaitu Terbentuknya forum PUSPA Propinsi Sulawesi Utara
9. **Fasilitasi Koordinasi Dukungan Satgas PPA Propinsi;** dengan sasaran Satgas Provinsi Sulut serta outputnya adalah Tim Satgas dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. **Kampanye BERLIAN - Stop Kekerasan;** bersama perkemahan kreatif remaja Kristen yang diikuti oleh 1000 peserta yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa
11. **Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah;** bagi Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara
12. **Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;** dengan kegiatan evaluasi kelembagaan Pokja PUG Provinsi Sulawesi Utara
13. **Layanan Operasional Dana Dekonsentrasi**

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya kebutuhan administrasi Umum	1,500,000,000	269,860,521	300,000,000	208,454,328	0.69	622,717,580	1,101,032,429	0.73
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	625,000,000	96,858,550	115,000,000	108,083,750	0.94	90,000,000	294,942,300	0.47
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi barang dan jasa	250,000,000	42,320,000	50,000,000	50,798,500	1.02	58,240,000	151,358,500	0.61
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian	75,000,000	7,633,000	15,000,000	17,296,250	1.15	15,000,000	39,929,250	0.53
	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,500,000,000	206,437,534	250,000,000	167,758,960	0.67	296,788,960	670,985,454	0.45
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	% Sarana Prasarana dalam							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kondisi baik								
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas operasional berupa 1 unit kendaraan dinas (Grand Livina) roda empat	1,000,000,000	198,598,500			#DIV/0!		198,598,500	0.20
	Pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan 1 Buah Brandkas, Laptop Sebanyak 3 Unit, Printer 3 Unit, 2 PC Komputer, 1 Meja Kerja Es.III, 3 Meja Kerja Es.IV	1,250,000,000	199,124,200	125,000,000	223,575,000	1.79	140,000,000	562,699,200	0.45
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara rutin dan secara berkala	212,000,000	17,142,000	25,000,000	12,989,480	0.52	40,430,000	70,561,480	0.33
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional/Dinas secara rutin dan secara berkala	625,000,000	77,724,981	110,000,000	105,882,769	0.96	141,850,000	325,457,750	0.52
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	550,000,000	21,795,000	30,000,000	17,765,000	0.59	25,000,000	64,560,000	0.12
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin							-	
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan 2 mesin/kartu absensi		19,910,000			-		19,910,000	0.00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Orang/Stel	150,000,000	27,258,000	30,000,000	38,610,000	1.29	104,600,000	170,468,000	1.14
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Orang/Stel	125,000,000	23,100,000	25,000,000	32,670,000	1.31		55,770,000	0.45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM yang meningkat kapasitas						-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	375,000,000	72,426,000			#DIV/0!		72,426,000	0.19
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	125,000,000	10,945,000	25,000,000	8,875,000	0.36		19,820,000	0.16
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti	150,000,000	7,203,800	25,000,000	8,875,000	0.36		16,078,800	0.11
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan					#DIV/0!		-	#DIV/0!
	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPP-PA Prov. Sulut	50,000,000		10,000,000	500,000	0.05	15,000,000	15,500,000	0.31
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	50,000,000	2,841,950	10,000,000		-	1,000,000	3,841,950	0.08
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPP-PA Prov. Sulut	50,000,000	2,980,000	10,000,000	5,127,500	0.51	11,000,000	19,107,500	0.38
	Program Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun							-	
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	300,000,000	37,684,000		20,186,000	-		57,870,000	0.19
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	125,000,000	-	20,000,000	35,769,000	1.79	39,850,000	75,619,000	0.60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	50,000,000	4,545,000	20,000,000	3,730,000	0.19	15,000,000	23,275,000	0.47
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% OPD implementasi PPRG							-	
	Pelatihan tentang Pengarustamaan Gender (PUG)	Jumlah Kebijakan terkait data gender dan anak	540,000,000		75,000,000	58,543,700	0.78		58,543,700	0.11
	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/dokumen	290,000,000		75,000,000	50,948,000	0.68	50,000,000	100,948,000	0.35
	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/orang	2,425,000,000		200,000,000	237,684,500	1.19	90,000,000	327,684,500	0.14
	Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Kegiatan/orang	3,800,000,000		200,000,000	336,397,000	1.68	251,216,800	587,613,800	0.15
	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah Kegiatan	1,110,000,000		150,000,000	202,791,000	1.35	55,500,000	258,291,000	0.23
	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	580,000,000		75,000,000	44,090,000	0.59	50,400,000	94,490,000	0.16
	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Kegiatan	1,040,000,000		150,000,000	76,147,700	0.51		76,147,700	0.07
	Kampanye Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarustamaan Gender (HeForShe)	Jumlah Kegiatan	750,000,000		75,000,000	107,338,800	1.43		107,338,800	0.14
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten/Kota dan Dokumen	250,000,000	35,775,400	75,000,000	48,556,000	0.65	34,000,000	118,331,400	0.47
	Training of Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Kegiatan	430,000,000			70,887,000			70,887,000	0.16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Perlindungan Hak Perempuan	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar							-	
	Dukungan Kegiatan Jambore Lansia	Jumlah Kegiatan	202,500,000			18,727,700			18,727,700	0.09
	Pelatihan bagi SDM tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah SDM terlatih			75,000,000	38,119,200	0.51	75,778,525	113,897,725	
	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan dengan masalah sosial	Jumlah Kegiatan	1,025,000,000		75,000,000	46,465,400	0.62		46,465,400	0.05
	Temu Karya Lansia	Jumlah Kegiatan	975,000,000			140,358,500	!		140,358,500	0.14
	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah SDM terlatih			75,000,000	-	-		-	
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiatan/orang	800,000,000	74,863,002	150,000,000	45,355,694	0.30	85,250,000	205,468,696	0.26
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten/Kota dan Kegiatan	475,000,000	28,781,400	75,000,000	48,692,300	0.65	58,403,875	135,877,575	0.29
	Pemberdayaan Lansia Perempuan Produktif						-	63,977,600	63,977,600	0.00
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	% Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)							-	
	Penyusunan Profil Perlindungan Pemenuhan bagi Hak Anak	Jumlah Dokumen Profil			75,000,000	-	-		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan dan SDM terlatih	650,000,000		100,000,000	84,089,600	0.84		84,089,600	0.13
	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah kegiatan	2,500,000,000		100,000,000	69,556,100	0.70	86,050,000	155,606,100	0.06
	Fasilitasi Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)	Jumlah kegiatan	925,000,000		75,000,000	71,464,300	0.95	100,300,000	171,764,300	0.19
	Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah kegiatan	1,150,000,000		75,000,000	21,083,200	0.28	50,800,000	71,883,200	0.06
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten/Kota dan Kegiatan	100,000,000		75,000,000	48,663,800	0.65	34,000,000	82,663,800	0.83
	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah kegiatan	750,000,000	-	-	71,145,000	#DIV/0!		71,145,000	0.09
	Fasilitasi Forum Anak Daerah	Jumlah kegiatan	1,500,000,000	-	-	250,779,500	#DIV/0!	150,000,000	400,779,500	0.27
	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	Jumlah kegiatan	1,000,000,000			100,127,000	#DIV/0!	105,325,000	205,452,000	0.21
	Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah Kegiatan				-	-		-	-
	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	% Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar							-	
	Operasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan	3,250,000,000			514,083,835	#DIV/0!	254,150,000	768,233,835	0.24
	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Kegiatan			50,000,000	22,275,000	0.45	40,842,281	63,117,281	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking	Jumlah Kegiatan	1,125,000,000		175,000,000	128,038,252	0.73	50,112,600	178,150,852	0.16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Analisis Indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah
Provinsi Sulawesi Utara

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui :											
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,64	95,00	95,00	96,00	95,04		95,00	96,00	Provinsi dengan IPG tertinggi ditempati oleh Sulawesi Utara sebesar 95,04 dan provinsi dengan IPG terendah ditempati oleh Papua sebesar 79,09. Pada tahun 2016, terdapat 15 dari 34 provinsi atau hampir separuh provinsi di Indonesia dengan IPG di atas rata-rata nasional.
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			79,82	79,82	79,82	79,85	81,29		79,82	79,85	Secara nasional, IDG Indonesia pada tahun 2016 sebesar 71,39. Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan IDG

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
												tertinggi sebesar 81,29. Sedangkan provinsi dengan IDG terendah ditempati oleh Papua Barat dengan IDG sebesar 49,56.
3	% OPD implementasi PPRG			33.3	44.4	55.6	77.8	77.5		55.6	77.8	
4	Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik			100	100	100	100	130		100	100	
5	Jumlah usaha perempuan terlatih			300	300	300	300	400		300	300	
B	Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui :											
1	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar			100	100	100	100	100		100	100	
2	Jumlah lansia Produktif/tangguh mendapat program pemberdayaan perempuan			300	300	300	300	360		300	300	
3	Jumlah SDM terlatih tentang pelayanan pendampingan korban kekerasan			60	60	60	60	40		60	60	
4	Ratio Kekerasan dalam rumah tangga			0,4	0,3	0,3	0,3	0.08		0.08	0.08	Faktor meningkatnya rasio adalah masyarakat/korban semakin sadar untuk melapor sebagai dampak dari sosialisasi dan adanya lembaga penyedia layanan
C	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, dan perlindungan anak melalui :											
1	% Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)			7%	7%	20%	20%	7%		20%	20%	Tahun 2017 Kota Bitung mendapatkan KLA kategori Pratama, sedangkan Kota Kotamobagu sebagai penghargaan kota dengan Percepatan Akte Kelahiran
2	Jumlah kab/kota menuju kabupaten/kota layak anak			1	2	2	2	7		2	2	Tahun 2017 4 Kota yang mengikuti penilaian KLA yaitu Kota, Manado,

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
												Bitung, Tomohon, Kotamobagu dan 3 Kabupaten, yaitu Minahasa dan Minahasa Utara serta Minahasa Tenggara
3	Jumlah kab/kota pembentukan kelembagaan anak			2	2	2	2	15		2	2	
C	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui :											
1	% Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
D	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui :											
1	Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			28	28	28	28	28		28	28	
2	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Dunia Usaha serta Media			2	2	2	2	2		2	2	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa Isu terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih rendah
2. Koordinasi kelembagaan jejaring kemitraan antar Provinsi maupun kab/Kota terbatas
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Belum terbentuknya Gugus Tugas di kabupaten maupun Kota
5. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan Undang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak
6. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan.
7. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak
8. Ketersediaan data gender dan anak masih terbatas
9. Terbatasnya kualitas SDM dalam pendampingan korban
10. Masih Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
11. Anggaran yang berhubungan dengan gender relatif belum memadai.
12. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas.
13. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (women-trafficking) dan kekerasan dalam rumah tangga.
14. Kualitas hidup perempuan masih harus ditingkatkan mengingat peran mereka sangat sentral dalam pembangunan.
15. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sangat penting untuk diperhatikan.
16. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih perlu didorong dalam membawa aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesejahteraan.
17. Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih harus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.
18. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan;
19. Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi;
20. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
21. Belum efektifnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan;
22. Masih kurangnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
23. Kasus kekerasan anak di Sulawesi Utara (Sulut) masih relatif tinggi.

Sedangkan Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Utara dapat digambarkan melalui **Analisis SWOT**; dengan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai berikut :

Analisis SWOT

INTERNAL	<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP-PAD mempunyai Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (trafficking) terutama Perempuan dan Anak. 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. 2. Adanya lembaga mitra dan pusat pelayanan terpadu 	<p>Kelemahan (Weaknesses) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Era Baru kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum didukung dengan kapasitas sumberdaya manusia. 2. Masih terbatasnya dana dan SDM terlatih untuk menunjang koordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu 3. Nomenklatur Kelembagaan Dinas masih terdapat 5 Kab/Kota yang masih dinas gabungan
	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas pelayanan pemberdayaan dan perlindungan untuk mewujudkan misi Gubernur (S1 - O1) 2. Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender (S1,2 - O1) 3. Membangun sinergitas dengan lembaga mitra (S2 - O2) 4. Mengoptimalkan pusat pelayanan terpadu (S2 - O2) 5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (S2 - O1) 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (W1 - O1) 2. Meningkatkan kemampuan SDM melalui Bimtek/Diklat dalam berbagai bidang tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan Clean Government & Good Governance (W2 - O1) 3. Menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakan pengawasan (W3 - O1) 4. Membangun sinergitas aparat pengawas dengan masyarakat (W3 - O2)
<p>melalui melalui misi II yang termuat dalam Dokumen RPJMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya peran lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak 3. Merupakan Urusan Wajib pemerintah daerah 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dalam koordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka mengadvokasi korban trafiking dan kekerasan 2. Mengadvokasi aparat penegak hukum agar meninfdak tegas pelaku trafiking dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penjajakan MoU dengan Provinsi terkait yang rawan dijadikan tempat tujuan trafiking 4. Meningkatkan kerja sama antara Instansi terkait terutama aparat penegak hukum 5. Mensosialisasikan tentang trafiking dan KDRT kepada masyarakat 	<p>Strategi W-T</p>
<p>Ancaman/Tantangan (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikas juga transportasi yang mendorong semakin banyaknya pelaku dan korban trafiking 2. Tidak adanya sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi pelaku trafiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Masih engganya keluarga korban trafiking untuk melaporkan kasus trafiking dan Kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang trafiking dan KDRT 		

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 khususnya pada Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara melalui hasil pembahasan dan masukan dalam Focus Group Discussion Bidang teknis serta hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan baik volume target kinerja maupun jumlah anggaran sesuai kebutuhan Tahun 2019.

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; NILAI LKIP SKPD Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B	B	790,000,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; NILAI LKIP SKPD Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B	B	790,000,000.00	
1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Provinsi	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum setiap bulan	12	300,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Provinsi	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum setiap bulan	12	300,000,000.00	
2	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Provinsi	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan setiap bulan	12	125,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Provinsi	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan setiap bulan	12	125,000,000.00	
3	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	12	50,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	12	50,000,000.00	
4	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	12	15,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	12	15,000,000.00	
5	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	300,000,000.00	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	300,000,000.00	

6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100	750,000,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100	750,000,000.00	
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1, 2	200,000,000.00	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1, 2	200,000,000.00	
2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Jumlah Peralatan/perlengkapan gedung Kantor	14	250,000,000.00	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Jumlah Peralatan/perlengkapan gedung Kantor	14	250,000,000.00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi	Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	12	50,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi	Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	12	50,000,000.00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara berkala	12	125,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara berkala	12	125,000,000.00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	12	125,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	12	125,000,000.00	
6	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	Provinsi	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala			Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	Provinsi	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala			
3	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin	95%	55,000,000.00	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin	95%	55,000,000.00	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi	Jumlah Orang/Stel	42 Stel/Orang	30,000,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi	Jumlah Orang/Stel	42 Stel/Orang	30,000,000.00	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi	Jumlah Orang/Stel	42 Stel/orang	25,000,000.00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi	Jumlah Orang/Stel	42 Stel/orang	25,000,000.00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN meningkat kapasitasnya	2	130,000,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN meningkat kapasitasnya	2	130,000,000.00	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi	Jumlah Aparatur DPP-PA yang mengikuti Pendidikan	4	75,000,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi	Jumlah Aparatur DPP-PA yang mengikuti Pendidikan	4	75,000,000.00	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	45	25,000,000.00	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	45	25,000,000.00	
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti	45	30,000,000.00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti	45	30,000,000.00	

5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100	30,000,000.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100	30,000,000.00	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	5	10,000,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	5	10,000,000.00	
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1	10,000,000.00	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1	10,000,000.00	
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi	Jumlah dokumen Laporan yang tersusun	2	10,000,000.00	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi	Jumlah dokumen Laporan yang tersusun	2	10,000,000.00	
6	Program Perencanaan SKPD		% dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100%	95,000,000.00	Program Perencanaan SKPD		% dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100%	95,000,000.00	
1	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	5	60,000,000.00	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	5	60,000,000.00	
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	25,000,000.00	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	25,000,000.00	
3	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	10,000,000.00	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	10,000,000.00	
7	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Meningkatnya % OPD implementasi PPRG	56	2,870,000,000	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Meningkatnya % OPD implementasi PPRG	56	2,870,000,000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Pelatihan tentang Pengrusutamaan Gender(PUG)	Provinsi dan Kab./kota	Jumlah SDM terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, infrastruktur,IPTEK,Pendidikan ,Kesehatan,sumberdaya alam danLingkungan,Ketenagakerjaan,Pertanian,Kehutanan,Perikanan,Kelautan ,Ketaahanan Pangan,dan Agrobisnis serta Koperasi,Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan ,Provinsi Kab/Kota,dan Ormas.	200	125,000,000	Pelatihan tentang Pengrusutamaan Gender(PUG)	Provinsi dan Kab./kota	Jumlah SDM terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, infrastruktur,IPTEK,Pendidikan ,Kesehatan,sumberdaya alam danLingkungan,Ketenagakerjaan,Pertanian,Kehutanan,Perikanan,Kelautan,Ketaahanan Pangan,dan Agrobisnis serta Koperasi,Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan ,Provinsi Kab/Kota,dan Ormas.	200	125,000,000	

2	Training Of Fasilitator PUG	provinsi dan Kab/Kota	Jumlah SDM terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, infrastruktur,IPTEK,Pendidikan ,Kesehatan,sumberdaya alam danLingkungan,Ketenagakerjaan,Pertanian,Kehutanan,Perikanan,Kelautan ,Ketaahanan Pangan,dan Agrobisnis serta Koperasi,Usaha Mikro dan kecil Industri dan Perdagangan, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	50 orang	85,000,000	Training Of Fasilitator PUG	provinsi dan Kab/Kota	JUmlah SDM terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, infrastruktur,IPTEK,Pendidikan ,Kesehatan,sumberdaya alam danLingkungan,Ketenagakerjaan,Pertanian,Kehutanan,Perikanan,Kelautan,Ketaahanan Pangan,dan Agrobisnis serta Koperasi,Usaha Mikro dan kecil Industri dan Perdagangan, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	50 orang	85,000,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Provinsi	JUMLH kegiatan/dokumen	1	60,000,000	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Provinsi	JUMLH kegiatan/dokumen	1	60,000,000	
4	Pelatihan penusunan perencanaan penganggaran responsif gender(PPRG)/pendampingan	kab/kota/provinsi	Jumlah kegiatan	80	150,000,000	Pelatihan penusunan perencanaan penganggaran responsif gender(PPRG)/pendampingan	kab/kota/provinsi	Jumlah kegiatan	80	150,000,000	
5	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	kabupaten/kota	Jumlah kegiatan/orang	2500	650,000,000	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	kabupaten/kota	Jumlah kegiatan/orang	2500	650,000,000	
6	Peltihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dlam mengelola usaha		Jumlah kegiatan/orang	1200	900,000,000	Peltihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dlam mengelola usaha		Jumlah kegiatan/orang	1200	900,000,000	
7	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan		Jumlah Kegiatan	3	320,000,000	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan		Jumlah Kegiatan	3	320,000,000	
8	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan/IKU Renstra		Jumlah kegiatan/orang	200	280,000,000	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan/IKU Renstra		Jumlah kegiatan/orang	200	280,000,000	
9	Kampanye (HeForShe) Peran Serta Laki-laki Terhadap Pengarusutamaan Gender	Provinsi/Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan Kampanye - Talkshow - Dialog Interaktif - Radio - Televisi -	500	150,000,000	Kampanye (HeForShe) Peran Serta Laki-laki Terhadap Pengarusutamaan Gender	Provinsi/Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan - Kampanye - Talkshow - Dialog Interaktif - Radio - Televisi -	500	150,000,000	
10	Rakor PUG	Provinsi/Kabupaten Kota	Rakor PUG setiap tahun	2	100,000,000	Rakor PUG	Provinsi/Kabupaten Kota	Rakor PUG setiap tahun	2	100,000,000	

11	Monitoring evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kabupaten/Kota/Dokumen	15 Kabupaten/Kota	50,000,000	Monitoring evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kabupaten/Kota/Dokumen	15 Kabupaten/Kota	50,000,000	
8	Program Perlindungan Hak Perempuan		Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar	100%	1,802,500,000	Program Perlindungan Hak Perempuan		Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar	100%	1,802,500,000	
			Cakupan Lansia yang mendapat program pemberdayaan Perempuan					Cakupan Lansia yang mendapat program pemberdayaan Perempuan			
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Dukungan Kegiatan Jambore Lansia	Prov. Sulut	Jumlah Orang yang mengikuti jambore lansia	100 org	37,500,000	Dukungan Kegiatan Jambore Lansia	Prov. Sulut	Jumlah Orang yang mengikuti jambore lansia	100 org	37,500,000	
2	Temu Karya Lansia	Manado	Jumlah lansia yang mengikuti temu karya	400 org	200,000,000	Temu Karya Lansia	Manado	Jumlah lansia yang mengikuti temu karya	400 org	200,000,000	
3	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan dengan masalah sosial	Manado	Jumlah Orang	50 org	220,000,000	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan dengan masalah sosial	Manado	Jumlah Orang	50 org	220,000,000	
4	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan Korban kekerasan dan TPPO	Manado	Jumlah Orang	50 org	220,000,000	Pelatihan Keterampilan bagi perempuan Korban kekerasan dan TPPO	Manado	Jumlah Orang	50 org	220,000,000	
5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	50 org	220,000,000	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	50 org	220,000,000	
6	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi/Kab/Kota dan Ormas	100 org	100,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi/Kab/Kota dan Ormas	100 org	100,000,000	
7	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Manado	Jumlah Kegiatan/Orang	100 org	200,000,000	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Manado	Jumlah Kegiatan/Orang	100 org	200,000,000	
8	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan/KDRT	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan	100 org	150,000,000	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan/KDRT	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan	100 org	150,000,000	

9	Fasilitasi Peran Kemitraan pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Manado	Jumlah kesepakatan bersama antara DP3AD dengan PD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	10 Mou	60,000,000.00	Fasilitasi Peran Kemitraan pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Manado	Jumlah kesepakatan bersama antara DP3AD dengan PD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	10 Mou	60,000,000.00	
10	Penyusunan lembaga jejaring penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO	-	Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak	-	-	Penyusunan lembaga jejaring penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO	Manado	Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak	2 lembaga	50.000.000	Penguatan Jejaring Penanganan TPPO
11	Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	15 kab/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pendampingan	100 org	50,000,000	Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	15 kab/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pendampingan	100 org	50,000,000	
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 kab/kota	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 kab/kota	100,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 kab/kota	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 kab/kota	100,000,000	
15	Pelatihan Petugas Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	-	Jumlah SDM terlatih tentang penanganan	-	-	Pelatihan Petugas Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Manado	Jumlah SDM terlatih tentang penanganan	50 org	100,000,000	Penguatan Pelayanan Program P2TP2A
16	Pengembangan Sistem Pelaporan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis On-Line	-	Aplikasi layanan online	-	-	Pengembangan Sistem Pelaporan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis On-Line	Manado	Aplikasi layanan online	1 paket	30.000.000	Penguatan Pelayanan Program P2TP2A
9	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, dan perlindungan anak melalui : % Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)	20	2,470,000,000	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, dan perlindungan anak melalui : % Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)	20	2,470,000,000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Penyusunan Profil Anak berkebutuhan Khusus (ABK)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah dokumen profil Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) serta kekerasan terhadap anak	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Profil Anak berkebutuhan Khusus (ABK)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah dokumen profil Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) serta kekerasan terhadap anak	1 Dokumen	100,000,000	
2	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah Orang	100	150,000,000	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah Orang	100	150,000,000	
3	Pengembangan Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)	3 Kab/Kota; Kab.Bolsel, Kab.Sangihe, Kotamobagu	Jumlah Orang /Kelompok	300	200,000,000	Pengembangan Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)	3 Kab/Kota; Kab.Bolsel, Kab.Sangihe, Kotamobagu	Jumlah Orang /Kelompok	300	200,000,000	

4	Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Kegiatan/Orang	100	75,000,000	Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Kegiatan/Orang	100	75,000,000	
5	Pelatihan Sstem Perlindungan Anak (SPA)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah Orang	100	200,000,000	Pelatihan Sstem Perlindungan Anak (SPA)	Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah Orang	100	200,000,000	
6	Pelatihan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kepulauan. Tahuna	Jumlah Kegiatan dan SDM terlatih tentang Perlindungan bagi anak berhadapan dengan Hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah social, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL), good parenting serta kekerasan terhadap anak dan Provinsi Kab/Kota, dan Ormas.	200	125.000.000	Pelatihan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kepulauan. Tahuna	Jumlah Kegiatan dan SDM terlatih tentang Perlindungan bagi anak berhadapan dengan Hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah social, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL), good parenting serta kekerasan terhadap anak dan Provinsi Kab/Kota, dan Ormas.	200	125.000.000	
7	Bimbingan Teknis penerapan kebijakan bagi anak korban kekerasan	-	Jumlah SDM terlatih yang menguasai kebijakan	-	-	Bimbingan Teknis penerapan kebijakan bagi anak korban kekerasan	Manado	Jumlah SDM terlatih yang menguasai kebijakan	50 org	50.000.000	Implementasi UU SPPA
8	Pelatihan bagi SATGAS penanganan anak korban kekerasan	-	Jumlah SDM SATGAS terlatih tentang penanganan anak korban kekerasan	-	-	Pelatihan bagi SATGAS penanganan anak korban kekerasan	Minahasa	Jumlah SDM SATGAS terlatih tentang penanganan anak korban kekerasan	50 org	50.000.000	Implementasi UU SPPA
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 kab/kota	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 kab/kota	50.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 kab/kota	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 kab/kota	50.000.000	
10	Fasilitasi dan Pembentukan Kabupaten/kota layak anak	Kepl. Sanger Sitiro Talaud	Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan kabupaten/kota layak anak	3	500,000,000	Fasilitasi dan Pembentukan Kabupaten/kota layak anak	Kepl. Sanger Sitiro Talaud	Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan kabupaten/kota layak anak	3	500,000,000	
11	Fasilitasi Forum Anak Daerah	Provinsi	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Anak/Forum Anak Daerah, Forum Anak Daerah, Kongres Anak Indonesia, Forum Anak Nasional	3	300,000,000	Fasilitasi Forum Anak Daerah	Provinsi	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Anak/Forum Anak Daerah, Forum Anak Daerah, Kongres Anak Indonesia, Forum Anak Nasional	3	300,000,000	
12	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	200	200,000,000	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	200	200,000,000	

13	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Provinsi	Terfasilitasinya	12	250,000,000	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Provinsi	Terfasilitasinya	12	250,000,000
14	Pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA)	Kabupaten Mitra	Jumlah Orang	75	150,000,000	Pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA)	Kabupaten Mitra	Jumlah Orang	75	150,000,000
15	Pelatihan Rumah Sakit Ramah Anak (PRA)	Kota Bitung	Jumlah Orang	75	150,000,000	Pelatihan Rumah Sakit Ramah Anak (PRA)	Kota Bitung	Jumlah Orang	75	150,000,000
16	Percepatan Pemilikan Akte Anak	Kabupaten Boltim	Jumlah Orang/Anak	75	150,000,000	Percepatan Pemilikan Akte Anak	Kabupaten Boltim	Jumlah Orang/Anak	75	150,000,000
10	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100%	1,420,000,000	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100%	1,420,000,000
			melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		
	Kegiatan :					Kegiatan :				
1	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Provinsi	Jumlah Kegiatan	12	650,000,000	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Provinsi	Jumlah Kegiatan	12	650,000,000
2	Rapat Koordinasi dengan jejaring P2TP2A	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	100	50,000,000	Rapat Koordinasi dengan jejaring P2TP2A	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	100	50,000,000
3	Pelatihan Pengurus P2TP2A	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	100	75,000,000	Pelatihan Pengurus P2TP2A	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	100	75,000,000
4	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Kasus/ Orang	120	225,000,000	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Kasus/ Orang	120	225,000,000
5	Pengembangan sistem aplikasi layanan laporan online	Provinsi	aplikasi layanan laporan online	1	30,000,000	Pengembangan sistem aplikasi layanan laporan online	Provinsi	aplikasi layanan laporan online	1	30,000,000
6	Pemeliharaan sistem aplikasi layanan laporan online	Provinsi	terpeliharanya sistem aplikasi layanan laporan online	12	35,000,000	Pemeliharaan sistem aplikasi layanan laporan online	Provinsi	terpeliharanya sistem aplikasi layanan laporan online	12	35,000,000
7	Advokasi tentang lembaga pengaduan P2TP2A dan aplikasi online	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	15	250,000,000	Advokasi tentang lembaga pengaduan P2TP2A dan aplikasi online	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	15	250,000,000
8	Penyusunan SOP di P2TP2A	Provinsi	Tersusunnya SOP di P2TP2A	1	30,000,000	Penyusunan SOP di P2TP2A	Provinsi	Tersusunnya SOP di P2TP2A	1	30,000,000

9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 Kab/Kota	75,000,000.00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15 Kab/Kota	75,000,000.00	
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2,930,200,000.00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2,930,200,000.00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Penyusunan Grand Desain Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	120		Kajian tentang kekerasan terhadap anak (Pelecehan Seksual)	Kec. Likupang Timur & Kec. Bunaken	2 Kegiatan	200 Org	150,000,000	
2	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Pemenuhan bagi Hak Anak		Jumlah Kebijakan Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) serta kekerasan terhadap anak	1		Kajian tentang tingginya kekerasan terhadap perempuan	2 Kab/Kota	2 Kegiatan	300 Org	200,000,000	
3	Penyusunan Kebijakan Pengarusutamaan gender di segala aras bidang pembangunan yang reponsif gender		Jumlah kebijakan bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang serta politik dan pengambilan keputusan disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	12		Merumuskan Kebijakan dari hasil Kajian	4 Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dok	150,000,000	

4	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	15	957,000,000	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan	Provinsi	Jumlah Kegiatan/Orang	4 Keg	957,000,000	
5	Updating data gender dan anak dan Pengelolaan Website P3A (e-government dan Simfoni/SIGA)		Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak	1		Updating data gender dan anak dan Pengelolaan Website P3A (e-government dan Simfoni/SIGA)	Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	
6	Pelatihan System Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak		Jumlah SDM terlatih tentang system data terpilah, statistik gender dan anak	15 Kab/Kota		Pelatihan System Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak	Provinsi dan 2 Kepulauan (Siau dan Talaud)	Jumlah SDM terlatih tentang system data terpilah, statistik gender dan anak	60 Orang	200,000,000	
7	Pelatihan Aplikasi E-dan Data Kekerasan		Jumlah SDM Kab/Kota yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan	28		Pelatihan Aplikasi E- dan Data Kekerasan	Provinsi	Jumlah SDM Kab/Kota yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan	60 Orang	75,000,000	
8	Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Kegiatan			Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi	Jumlah Kegiatan	2 Keg	250,000,000	
9	Penguatan Forum Laki-laki Peduli Perempuan dan Anak		Jumlah Kegiatan Penguatan Forum Laki laki peduli perempuan dan anak	1		Kerjasama dengan dunia Usaha	Provinsi	Jumlah Kerjasama	1 Keg	75,000,000	
10	Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Kegiatan/Orang	1		Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi	Jumlah Kegiatan	100 Orang	175,000,000	
11	Kerjasama dengan dunia Usaha, dan PT (Perguruan Tinggi)		Jumlah Kerjasama	1		Sosialisasi dan Jelajah Program Unggulan (Three	Provinsi (SD)	Jumlah Kegiatan	1	200,000,000	

						Ends) Pemberdayaan Perempuan dan Anak					
12	Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Kegiatan	2.00		Rakor Data	Provinsi	Jumla Kegiatan	1 Kali	200,000,000	
13	Sosialisasi dan Jelajah Program Unggulan (Three Ends) Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Jumlah Kegiatan	1		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	15	75,000,000	
14	Kajian terkait Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan serta Kesejahteraan Anak		Jumlah Kajian	50							
15	Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah Dokumen Peraturan	100							
16	Rakor Data		Jumla Kegiatan	2							
17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	2							

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kelembagaan dan program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka telah dibentuk lembaga Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur komponen masyarakat, organisasi yang berbasis lembaga agama, dunia usaha dan media yang peduli terhadap perempuan dan anak. Forum ini telah menyusun rencana aksi dan usulan proposal kegiatan untuk tahun 2019 untuk disinergikan dengan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait program dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Disamping kelembagaan yang berbasis masyarakat, urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak juga bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi antara lain Pusat Kajian Wanita dan Perlindungan Anak Unima dan Pusat Kajian Perempuan Unsrat sekaligus juga memberikan masukan dalam rangka rencana program dan kegiatan Tahun 2019.

Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir Renja 2019 ada Berapa Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik dari lembaga Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun unsur perguruan tinggi yaitu Pusat Kajian Wanita dan Perlindungan Anak Unima dan Pusat Kajian Perempuan Unsrat disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
1	Pelatihan Pembuatan Makanan Siap Saji Dan Katering Bagi Perempuan	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 40 orang Pelatih : 5 orang Fasilitator : 2 orang	
2	Pelatihan Pembuatan Kue Jajan Pasar Bagi Perempuan	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 40 orang Pelatih : 5 orang Fasilitator : 2 orang	
3	Pelatihan Manajemen Dan Pemasaran Produksi Rumahan Bagi Perempuan	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 40 orang Pelatih : 5 orang Fasilitator : 2 orang	
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				

1	Pengadaan Taman Bermain Anak / RPTRA	Manado	1 Paket	<ul style="list-style-type: none"> • Ayunan Bangku 1 Unit • Ayunan Rantai 1 Unit Tinggi 2 M • Perosotan • Jungkitan standar P: 3m T 58 cm • Panjang Laba-Laba 1 Unit • Pagar Bambu 1 Unit • Rumput dan Bunga • Papan Untuk tenis Meja • Perlengkapan Permainan 	Mendukung Indikator Kab/Kota Layak Anak
2	Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 50 orang	Mendukung Indikator Kab/Kota Layak Anak mempercepat kepemilikan akte kelahiran
3	Sosialisasi Internet Sehat	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 50 orang	Mendukung Indikator Kab/Kota Layak Anak Pencegahan anak korban pornografi
4	Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT & Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 50 orang	Mendukung Indikator Kab/Kota Layak Anak Pencegahan anak korban kekerasan, KDRT
5	Pelatihan SPA (Sistem Perlindungan Anak)	15 Kab/Kota	Jumlah Orang	Peserta : 60 orang	<p>indikator kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • adanya SDM terlatih dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara terpadu, komprehensif dan holistik. • adanya sdm yang memiliki kapasitas dalam menganalisis norma perundang-undangan terkait anak, menganalisis ketersediaan struktur kelembagaan sesuai amanat perundang-undangan/kebijakan, dan menganalisis kesesuaiannya dengan keseluruhan program/kegiatan baik yg sudah dilaksanakan maupun yg akan direncanakan

6	Pelatihan PATBM secara terstruktur dan berkelanjutan	15 Kab/Kota	Jumlah Orang	Peserta : 60 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Kelompok Aktivistis PATBM di desa/kelurahan di setiap kab/kota di Provinsi Sulut
7	Pelatihan <i>Peer Educator</i>	Manado	Jumlah Orang	Peserta : 60 orang	Adanya Pendidik Sebaya sebagai tenaga terlatih di setiap SMA guna menunjang perluasan kegiatan sosialisasi di kalangan remaja usia anak
8	Pembentukan Sanggar Perlindungan Anak Terpadu (SPAT)	Kota Tomohon dan Kab. Kepulauan Talaud	Jumlah Kelompok/Desa	3 Desa/Kelurahan Percontohan	Terbentuknya SPAT yang terintegrasi dengan PAUD-HI di setiap Kelurahan/Desa
9	Peningkatan Kualitas Layanan di P2TP2A dan PUSPAGA	15 Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga	15 Kabupaten Kota	
	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak				
1	Pemberdayaan Keluarga Korban Trafficking	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Orang	disesuaikan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peningkatan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui 2 fokus prioritas.

Pertama, Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran di masing-masing sektor. Fokus prioritas ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Kedua, Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui : (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan anak; (b) peningkatan kapasitas pelaksanaan pembangunan anak; (c) peningkatan penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi anak; (d) peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak. Fokus prioritas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut juga didukung oleh :

- A. Peningkatan kualitas manajemen dan tatakelola pembangunan bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- B. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak; dan
- C. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kab/kota.

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada :

1. Menyusun berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak termasuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan pemerintah daerah dan lembaga dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
2. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak pada program pemerintah/ lembaga.

3. Membangun jejaring kelembagaan dan narasumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan mendorong pemenuhan hak anak
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak di pemerintah dan lembaga.
5. Menyusun manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Integrasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Yang **Memperhatikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** Dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Landasan Spiritual, Moral, Dan Etika Pembangunan
2. Terjaminnya **Kesetaraan Hak Anak Dan Anak-Anak Perempuan, Kesetaraan Gender** Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial PMKS

Sedangkan Tujuan Khusus yang akan dicapai oleh Dinas PP-PAD melalui:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan **dengan sasaran** meningkatnya kualitas hidup perempuan;
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan **dengan sasaran** berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, **dengan sasaran** meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak;
4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **dengan sasaran** meningkatnya Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2019
	1. Terwujudnya Integrasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Yang Memperhatikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Landasan Spiritual, Moral, Dan Etika Pembangunan 2. Terjaminnya Kesetaraan Hak Anak Dan Anak-Anak Perempuan, Kesetaraan Gender				
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	a. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan	IPG	%	95,00
			IDG	%	79,82
2	Meningkatkan perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Dan TPPO.	a. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Per 1.000	10
			Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.	%	100
			Cakupan lansia yang mendapat program pemberdayaan perempuan	%	60
3	Meningkatkan Implementasi konsep kab/kota layak anak dan perlindungan pada anak.	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	% Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)	%	20
4	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	28

3.3. Program dan Kegiatan

**Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sult
Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; NILAI LKIP Dinas RATA - RATA MINIMUM B		B	1,144,155,000.00		B	1,125,000,000.00
	Kegiatan :							
1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum setiap bulan	Provinsi Sulawesi Utara	12 Bulan	700,000,000.00		12 Bulan	700,000,000.00
2	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan setiap bulan	Provinsi Sulawesi Utara	12 Bulan	90,000,000.00		12 Bulan	90,000,000.00
3	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Provinsi Sulawesi Utara	12 Bulan	60,000,000.00		12 Bulan	60,000,000.00
4	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi	Tersedianya Kebutuhan Administrasi	Provinsi Sulawesi	12 Bulan	12,000,000.00		12 Bulan	15,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kepegawaian	Kepegawaian setiap Bulan	Utara					
5	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab/Kota Se Provinsi dan Luar Daerah	1 TA	282,155,000.00		1 TA	260,000,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana Prasarana dalam kondisi baik		100	272,344,040.00		100	347,280,000.00
	Kegiatan :							
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi	1 Unit			1 Unit	240,000,000.00
2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan/perlengkapan gedung Kantor	Provinsi	6 Unit	64,954,040.00		6 Unit	175,000,000.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	Provinsi	1 TA	15,390,000.00		1 TA	45,000,000.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara	Provinsi	1 TA	142,000,000.00		1 TA	142,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		berkala						
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	Provinsi	1 TA	25,000,000.00		1 TA	25,000,000.00
6	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang Gedung Pameran	Provinsi	1 Paket	25,000,000.00		1 Paket	30,000,000.00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin		95%	110,000,000.00		95%	110,000,000.00
	Kegiatan :							
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Orang/Stel	Provinsi	54 Stell	110,000,000.00		54 Stell	110,000,000.00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Orang/Stel	Provinsi	54 Stell	0.00		54 Stell	0.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN meningkat kapasitasnya		95%	20,000,000.00		95%	55,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan :							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur DPP-PA yang mengikuti Pendidikan	Provinsi	4	0.00		4	0.00
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Provinsi	45	20,000,000.00		45	25,000,000.00
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti	Provinsi	45	0.00		45	30,000,000.00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100	34,000,000.00		100	224,000,000.00
	Kegiatan :							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	Provinsi Sulawesi Utara	12 Bulan	15,000,000.00		12 Bulan	15,000,000.00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang	Provinsi Sulawesi Utara	2 Laporan	1,000,000.00		2 Laporan	1,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		tersusun						
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan yang tersusun	Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	11,000,000.00		1 Laporan	11,000,000.00
4	Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan	Provinsi Sulawesi Utara	12 Bulan	7,000,000.00		12 Bulan	7,000,000.00
6	Program Perencanaan SKPD	% dokumen perencanaan sesuai ketentuan		1	116,968,960.00		1	95,000,000.00
	Kegiatan :							
1	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Provinsi Sulawesi Utara	5	25,000,000.00		5	25,000,000.00
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Provinsi Sulawesi Utara	2	81,968,960.00		2	60,000,000.00
3	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	Provinsi Sulawesi Utara	2	10,000,000.00		2	10,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya % OPD implementasi PPRG		56%	502,750,000.00		56%	685,500,000.00
	Kegiatan :							
1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan/dokumen	Provinsi Sulawesi Utara	2 Kegiatan	70,232,500.00		2 Kegiatan	80,000,000.00
2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Orang	Kabupaten/kota	150 Orang	0.00	Dukungan Program ODSK	300 Orang	90,000,000.00
3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	kabupaten/kota	300 orang	238,075,000.00	Dukungan Program ODSK	300 orang	275,000,000.00
4	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah Kegiatan	Provinsi sulawesi utara dan luar daerah	1 Kegiatan	75,575,000.00		1 Kegiatan	55,500,000.00
5	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif	Jumlah Orang	provinsi sulawesi utara	60 Orang	70,630,000.00		60 Orang	75,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	gender (PPRG)							
6	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah kegiatan/orang	provinsi sulawesi utara	100 Orang	0.00		100 Orang	75,000,000.00
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota/Kegiatan	kabupaten /kota se provinsi sulawesi utara	15 Kab/Kota	48,237,500.00		15 Kab/Kota	35,000,000.00
8	Program Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar		1.00	477,250,000.00		1.00	425,250,000.00
	Kegiatan :							
1	Pelatihan bagi SDM tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang/Kegiatan	Provinsi Sulawesi Utara	60 Orang	75,000,000.00	Dukungan terhadap Program Nasional	60 Orang	75,000,000.00
2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Kejiata/Kali	Provinsi Sulawesi	2	85,250,000.00		2 Kegiatan	85,250,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO		Utara	Kegiatan				
3	Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan Korban kekerasan dan TPPO	Jumlah Orang	Manado	60 Orang	100,000,000.00	Dukungan terhadap Program Nasional	60 Orang	75,000,000.00
4	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi/Kab/Kota dan Ormas	Manado	60 Orang	75,000,000.00	Dukungan terhadap Program Nasional	60 Orang	75,000,000.00
5	Pemberdayaan Lansia Perempuan Produktif	Jumlah Orang/Kegiatan	Provinsi/kabupaten kota	1 kegiatan	100,000,000.00		1 kegiatan	65,000,000.00
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota/Kegiatan	kabupaten kota	1 Kegiatan	42,000,000.00		1 Kegiatan	50,000,000.00
9	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak		20%	675,000,000.00		20%	785,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dalam kondisi khusus, dan perlindungan anak melalui : % Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)						
1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Kab/Kota/Kegiatan	Provinsi/kabupaten /kota	3 Kab/Kota	100,000,000.00	Dukungan Program Nasional	3 Kab/Kota	150,000,000.00
2	Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)	Jumlah Orang/Kegiatan	15 kabupaten kota	1 Kegiatan	60,000,000.00		2 Kegiatan	50,000,000.00
3	Penanganan pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Kegiatan/Orang	Provinsi Sulawesi Utara	1 Kegiatan	0.00		1 Kegiatan	35,000,000.00
4	Pelatihan bagi SATGAS penanganan anak korban kekerasan	Jumlah SDM SATGAS terlatih tentang penanganan anak korban kekerasan	Minahasa	75	75,000,000.00		75	75,000,000.00
5	Pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah Orang	Kabupaten Mitra	75	75,000,000.00		75	75,000,000.00
6	Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan/Orang	Provinsi Sulawesi	15 Anak	150,000,000.00		15 Anak	150,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Utara					
7	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan/Orang	Provinsi Sulawesi Utara	1 Kegiatan	175,000,000.00		1 Kegiatan	200,000,000.00
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota/Kegiatan	kabupaten/kota	15 Kab/Kota	40,000,000.00		15 Kab/Kota	50,000,000.00
10	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		100%	390,000,000.00		100%	525,000,000.00
	Kegiatan :							
1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	Provinsi Sulawesi Utara/kab/kota	12 Bulan	256,655,000.00		12 Bulan	300,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus/TA	Provinsi Sulawesi Utara dan Luar daerah	1 TA	59,975,000.00	Dukungan terhadap Program Nasional	1 TA	100,000,000.00
3	Penguatan Koordinasi Jejaring P2TP2A	Jumlah Kegiatan	Provinsi Sulawesi Utara	1 Kali/Kegiatan	22,270,000.00		2 Kali/Kegiatan	50,000,000.00
4	Pengembangan sistem aplikasi layanan laporan online	aplikasi layanan laporan online	Provinsi	1	51,100,000.00		1	75,000,000.00
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			540,750,000.00			975,000,000.00
	Kegiatan :							

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan/Organisasi	Provinsi Sulawesi Utara	2 Kegiatan	148,950,000.00		7 Kegiatan	500,000,000.00
2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah Kegiatan/Dokumen	Provinsi Sulawesi utara	1 Dokumen	175,000,000.00		1 Dokumen	200,000,000.00
3	Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kegiatan	Provinsi Sulawesi Utara	5 Kali	97,650,000.00		5 Kali	75,000,000.00
4	Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen/Peraturan	Provinsi Sulawesi Utara	1 Dokumen	33,750,000.00		1 Dokumen	75,000,000.00
5	Kajian tentang kekerasan terhadap anak (Pelecehan Seksual)	Jumlah Dokumen/	Kec. Likupang Timur & Kec. Bunaken	1 Dokumen	45,400,000.00	Mencari penyebab terjadinya kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dari berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya	1 Dokumen	75,000,000.00
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Kab/Kota se Prov. Sulut	4 Kab/Kota	40,000,000.00		4 Kab/Kota	50,000,000.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi Kabupaten/ Kota	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	TOTAL				4,153,218,000.00			5,352,030,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Pelaksana program dan Kegiatan Tahun 2019 akan ditindaklanjuti ditindaklanjuti dengan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2019 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas dengan perangkat daerah terkait dengan kabupaten/kota maupun kemitraan lembaga masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi . Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
								2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			1.11 . 1.11. 1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; NILAI LKIP SKPD Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B	Nilai	B	B	790,000,000.00	B	790,000,000.00	B	790,000,000.00	B	790,000,000.00	B	790,000,000.00	B	3,950,000,000.00		
Meningkatnya pelayanan administrasi	Tersedianya kebutuhan administrasi umum	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	1.11 . 1.11. 1 . 01	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum setiap bulan	bulan	12	12	300,000,000.00	12	300,000,000.00	12	300,000,000.00	12	300,000,000.00	12	300,000,000.00	48 Bulan	1,500,000,000.00		

			1.11 . 1.11. 1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Operasional/ Dinas secara Rutin dan Secara berkala	bulan	12	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	625,000,000.00		
			1.11 . 1.11. 1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	bulan	12	12	50,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	12	125,000,000.00	48 Bulan	550,000,000.00		
				Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala		0	Gedung P2Tp2 A dan Pameran													
Terciptanya keseragaman berpakaian Pegawai DPP-PA			1.11 . 1.11. 1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin	%	95%	95%	55,000,000.00	95%	55,000,000.00	95%	55,000,000.00	95%	55,000,000.00	95%	55,000,000.00	95%	275,000,000.00		
	Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1.11 . 1.11. 1 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Orang/Stel	Stel/orang	42 Stel/Orang	42 Stel/Orang	30,000,000.00	42 Stel/Orang	30,000,000.00	42 Stel/Orang	30,000,000.00	42 Stel/Orang	30,000,000.00	42 Stel/Orang	30,000,000.00	42 Stel/Orang	150,000,000.00		
	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1.11 . 1.11. 1 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Orang/Stel	Stel/orang	42 Stel/orang	42 Stel/orang	25,000,000.00	42 Stel/orang	25,000,000.00	42 Stel/orang	25,000,000.00	42 Stel/orang	25,000,000.00	42 Stel/orang	25,000,000.00	42 Stel/orang	125,000,000.00		
Meningkatnya Pengetahuan PNS	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.11 . 1.11. 1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN meningkatkan kapasitasnya	%	2	2	130,000,000.00	2	130,000,000.00	2	130,000,000.00	2	130,000,000.00	2	130,000,000.00	10%	650,000,000.00		
Meningkatnya PNS yang terampil dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja DPP-PA	Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan bimtek dalam dan luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan bimtek dalam dan luar daerah	1.11 . 1.11. 1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur DPP-PA yang mengikuti Pendidikan	orang	4	4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	4.00	375,000,000.00		

			1.11.1.11.1.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	orang	50	50	25,000,00.00	50	25,000,00.00	45	25,000,00.00	45	25,000,00.00	45	25,000,00.00	235	125,000,000.00		
			1.11.1.11.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti	orang	50	50	30,000,00.00	50	30,000,00.00	45	30,000,00.00	45	30,000,00.00	45	30,000,00.00	235	150,000,000.00		
Meningkatkan Kualitas Kinerja DPP-PA dan Sebagai Bahan Evaluasi Penyusunan Kebijakan kegiatan mendatang			1.11.1.11.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	500	150,000,000.00		
	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPP-PA Prov. Sulut	1.11.1.11.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	jenis	5	5	10,000,00.00	5	10,000,00.00	5	10,000,00.00	5	10,000,00.00	5	10,000,00.00	25	50,000,000.00		
	Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran DPP-PA Prov. Sulut	1.11.1.11.1.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	dok	1	1	10,000,00.00	1	10,000,00.00	1	10,000,00.00	1	10,000,00.00	1	10,000,00.00	5	50,000,000.00		
	Tersedianya laporan keuangan dan kinerja	Tersusunnya laporan Akhir Tahun	1.11.1.11.1.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan yang tersusun	dok	2	2	10,000,00.00	2	10,000,00.00	2	10,000,00.00	2	10,000,00.00	2	10,000,00.00	10	50,000,000.00		
Meningkatkan sistem Perencanaan yang tertib untuk kelancaran tugas DPP-PA			1.11.1.11.1.09	Program Perencanaan SKPD	% dokumen perencanaan sesuai ketentuan	%	100%	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	500%	475,000,000.00		
	Tersedianya Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis SKPD	1.11.1.11.1.09.01	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	dok	5	5	60,000,00.00	5	60,000,00.00	5	60,000,00.00	5	60,000,00.00	5	60,000,00.00	25	300,000,000.00		
	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	1.11.1.11.1.09	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen yang	dok	2	2	25,000,00.00	2	25,000,00.00	2	25,000,00.00	2	25,000,00.00	2	25,000,00.00	10	125,000,000.00		

			. 02		tersusun																	
	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran	1.11.1.11.1.09.03	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	dok	2	2	10,000,00 0.00	2	10,000,00 0.00	2	10,000,00 0.00	2	10,000,00 0.00	2	10,000,00 0.00	10			50,000,00 0.00	
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya % OPD implementasi PPRG	%	9	33	1,250,000,000	44	1,690,000,000	56	2,870,000,000	78	2,500,000,000	100	3,205,000,000	311			11,515,000,000.00	
					Jumlah usaha perempuan yang terlatih																	
					Jumlah kader parpol yang terlatih																	
				Kegiatan :																		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Pelatihan tentang Pengarustamaan Gender (PUG)	Jumlah SDM terlatih dan Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan, Provinsi/Kab/kota, dan Ormas	Orang	0	100 Orang	65,000,000	150	100,000,000	200	125,000,000	200	125,000,000	200	125,000,000	850 Orang			540,000,000.00	

		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Training of Fasilitator PUG	Jumlah Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	orang	0	50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	50 Orang	90,000,000	250 Orang					430,000,000.00		
		% OPD implementasi PPRG		Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	Kegiatan	0	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5					290,000,000.00		
		Jumlah Aparatur SKPD dan kab/kota yang melaksanakan pembangunan yang reponsif gender		Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	Orang Aparatur Perencana	80	90	50,000,000	60	80,000,000	80	150,000,000	80	150,000,000	80	150,000,000	390					580,000,000.00		
		Jumlah usaha perempuan terlatih		Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang/Ibu Rumah Tangga	0	900	250,000,000	300	250,000,000	2,500	650,000,000	2,800	600,000,000	3,000	675,000,000	9500					2,425,000,000.00		
				Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	0	300	300,000,000	300	500,000,000	1,200	900,000,000	1,200	900,000,000	1,600	1,200,000,000	4600					3,800,000,000.00		
				Kegiatan pameran hasil karya perempuan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3	3	150,000,000	3	315,000,000	3	320,000,000	3		3	325,000,000	15					1,110,000,000.00		

				dibidang pembangunan																
		Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik		Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	300	200	100,000,000	200	100,000,000	200	280,000,000	200	280,000,000	200	280,000,000	1000		1,040,000,000.00
				Kampanye (HeForShe) Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan	Orang	0	750	150,000,000	750	150,000,000	500	150,000,000	500	150,000,000	500	150,000,000	3000		750,000,000.00
				Rakor PUG	Rakor PUG setiap tahun	kali						2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6		300,000,000.00
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	Kab/Kota	8	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	75		250,000,000.00
Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan	Ratio Kekerasan dalam rumah tangga		Program Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar	%		100%	825,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,802,500,000	100%	2,020,000,000	100%	2,460,000,000	500%		8,407,500,000.00
					Cakupan Lansia yang mendapat program pemberdayaan Perempuan															
				Kegiatan :																
		Jumlah lansia Produktif/ tangguh mendapat program pemberdayaan perempuan		Dukungan Kegiatan Jambore Lansia	Jumlah Orang yang mengikuti jambore lansia	orang	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	37,500,000	200	50,000,000	250	65,000,000	750		202,500,000.00
				Temu Karya Lansia	Jumlah lansia yang	Orang/Lansia	0	300	150,000,000	300	150,000,000	400	200,000,000	425	225,000,000	450	250,000,000	1,875		975,000,000.00

					mengikuti temu karya																
				Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan dengan masalah sosial	Jumlah Orang	Orang	0	100	150,000,00 0	100	150,000,00 0	50	220,000,00 0	50	220,000,00 0	50	285,000,00 0	350			1,025,000,000.00
		Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar		Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan Korban kekerasan dan TPPO	Jumlah Orang	Orang	0			100	150,000,00 0	50	220,000,00 0	50	220,000,00 0	50	285,000,00 0	250			875,000,000.00
		Jumlah SDM terlatih tentang pelayanan pendampin gan korban kekerasan		Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah SDM terlatih	Orang	0	40	100,000,00 0	40	100,000,00 0	50	220,000,00 0	50	220,000,00 0	50	285,000,00 0	230			925,000,000.00
				Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi/Kab/K ota dan Ormas	Orang	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	100,000,00 0	100	100,000,00 0	100	150,000,00 0	500			450,000,000.00
				Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT- TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiatan/Oran g	Orang	100	100	150,000,00 0	100	150,000,00 0	100	200,000,00 0	100	150,000,00 0	100	150,000,00 0	500			800,000,000.00
		Ratio Kekerasan dalam rumah tangga		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban Kekerasan/KD RT	Jumlah SDM terlatih tentang Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan	Orang	30	100	150,000,00 0	100	150,000,00 0	100	150,000,00 0	100	175,000,00 0	100	250,000,00 0	500			875,000,000.00

					good parenting serta serta kekerasan terhadap anak dan Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas																
		Jumlah kab/kota pembentukan kelembagaan anak		Pembentukan Kabupaten/kota layak anak	Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan kabupaten/kota layak anak	Kab/Kota	0	3	500,000,00	3	500,000,00	3	500,000,00	3	500,000,00	3	500,000,00	15			2,500,000,000.00
				Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah Orang	Orang	0	75	150,000,00	300	150,000,00	75	150,000,00	75	150,000,00	75	150,000,00	600			750,000,000.00
				Fasilitasi Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Anak/Forum Anak Daerah, Forum Anak Daerah, Kongres Anak Indonesia, Forum Anak Nasional	Kegiatan	1	3	250,000,00	3	250,000,00	3	300,000,00	3	300,000,00	3	400,000,00	15			1,500,000,000.00
				Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	100	200	150,000,00	200	150,000,00	200	200,000,00	200	250,000,00	200	250,000,00	1,000			1,000,000,000.00
				Pengembangan Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF)	Jumlah Orang/Kelompok	Orang	4 Kelompok (4 Kab/Kota)	200	75,000,000	200	150,000,00	200	200,000,00	200	250,000,00	200	250,000,00	1,000			925,000,000.00
				Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terfasilitasinya	Bulan	0	12	150,000,00	12	150,000,00	12	250,000,00	12	300,000,00	12	300,000,00	60			1,150,000,000.00
				Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	2 Kegiatan/100 Orang	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	500			375,000,000.00

		% Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama)		Pelatihan Sstem Peradilan Anak (SPA)	Jumlah Orang	Orang	60				75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	225	450,000,000.00			
				Pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah Orang	Orang	60				75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	225	450,000,000.00			
				Pelatihan Rumah Sakit Ramah Anak (PRA)	Jumlah Orang	Orang	60				75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	225	450,000,000.00			
				Percepatan Pemilikan Akte Anak	Jumlah Orang/Anak	Orang	60				75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	225	450,000,000.00			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	Kab/Kota	8	15	50,000,000	15	50,000,000						30	100,000,000.00			
				Bimbingan Teknis penerapan kebijakan bagi anak korban kekerasan		Orang					50	50,000,000	75	75,000,000			125	125,000,000.00			
				Pelatihan bagi SATGAS penanganan anak korban kekerasan		Orang					50	50,000,000	75	75,000,000			125	125,000,000.00			
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perempuan dan Anak secara Terpadu	Terwujudnya kelembagaan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan secara Terpadu	Jumlah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	75%	100%	1,050,000,000	100%	1,390,000,000	100%	1,420,000,000	100%	1,115,000,000	100%	1,120,000,000	500	6,095,000,000.00		
				Kegiatan :																	
		% Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan	Bulan	12	12	650,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	60	3,250,000,000.00		

			Rapat Koordinasi dengan jejaring P2TP2A	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	500	250,000,000.00			
	Jumlah SDM terlatih tentang pelayanan pendampingan korban kekerasan		Pelatihan Pengurus P2TP2A	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang	0	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	500	375,000,000.00			
	% Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking	Jumlah Kegiatan/Kasus/Orang	Orang	131	120	225,000,000	120	225,000,000	120	225,000,000	120	225,000,000	120	225,000,000	600	1,125,000,000.00			
			Pengembangan sistem aplikasi layanan laporan online	aplikasi layanan laporan online	Kegiatan				1	30,000,000	1	30,000,000					2	60,000,000.00			
			Pemeliharaan sistem aplikasi layanan laporan online	terpeliharanya sistem aplikasi layanan laporan online	Bulan				12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	48	150,000,000.00			
			Advokasi tentang lembaga pengaduan P2TP2A dan aplikasi online	Jumlah Kegiatan/Orang	Kab/Kota				15	250,000,000	15	250,000,000					30	500,000,000.00			
			Penyusunan SOP di P2TP2A	Tersusunnya SOP di P2TP2A	Dokumen				1	30,000,000	1	30,000,000					2	60,000,000.00			
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota			15 Kab/Kota	50,000,000	15 Kab/Kota	50,000,000	15 Kab/Kota	75,000,000.00	15 Kab/Kota	75,000,000.00	15 Kab/Kota	75,000,000.00	15 Kab/Kota				

Meningkatnya penguatan kelembagaan peduli perempuan dan anak		Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya <i>Partisipasi masyarakat dalam</i> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	28	28	1,650,000,000	28	2,405,150,000	28	2,930,200,000	28	3,155,225,000	28	3,305,250,000	140					13,445,825,000.00		
					Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
					Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Dunia Usaha serta Media																				
					Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				

				Kegiatan :																
				Penyusunan Grand Desain Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan/ Dokumen			1	150,000	1	200,000	1	225,000	1	250,000	4			825,000.00
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Pemenuhan bagi Hak Anak	Jumlah Kebijakan Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) serta kekerasan terhadap anak	Dokumen			1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	2	225,000,000	5			675,000,000.00
				Penyusunan Kebijakan Pengarusutamaan gender di segala aras bidang pembangunan yang reponsif gender	Jumlah kebijakan bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan serta politik dan	Kebijakan/ Dokumen			1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	225,000,000	3			675,000,000.00

					pengambilan keputusan disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender															
				Kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan/Orang	Kegiatan	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	10.00			5,000,000,000.00
				Updating data gender dan anak dan Pengelolaan Website P3A (e-government dan Simfoni)	Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak	Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1	250,000,000	5			1,100,000,000.00
				Pelatihan System Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak	Jumlah SDM terlatih tentang system data terpilah, statistik gender dan anak	Orang	50	150,000,000	50	150,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	225,000,000	250			925,000,000.00

				Pelatihan Aplikasi E- dan Data Kekerasan	Jumlah SDM Kab/Kota yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan	Orang		100	50,000,000	100	50,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500			375,000,000.00
				Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		2	80,000,000	2	180,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10			1,010,000,000.00
				Penguatan Forum Laki-laki Peduli Perempuan dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Forum Laki laki peduli perempuan dan anak	Kegiatan				2	180,000,000	2	180,000,000	2	180,000,000	2	180,000,000	8			720,000,000.00
				Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kegiatan/Orang	Orang		300	150,000,000	300	150,000,000	300	150,000,000	300	150,000,000	300	150,000,000	1,500			750,000,000.00
			Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Dunia Usaha serta Media	Kerjasama dengan dunia Usaha, dan PT (Perguruan Tinggi)	Jumlah Kerjasama	Dokumen		1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5			375,000,000.00
				Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	100,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	5			875,000,000.00
				Sosialisasi dan Jelajah Program Unggulan (Three Ends) Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5			950,000,000.00

				Kajian terkait Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan serta Kesejahteraan Anak	Jumlah Kajian	Dokumen		1	90,000,000	1	90,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5			630,000,000.00			
				Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Peraturan	Dokumen		1	80,000,000	1	80,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5			610,000,000.00			
				Rakor Data	Jumla Kegiatan	Kegiatan				1	175,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4			775,000,000.00			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan/Kab/Kota	Kab/Kota		15	50,000,000	15	50,000,000	15	100,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	75			500,000,000.00			
				Kajian tentang kekerasan terhadap anak (Pelecehan Seksual)		Kab/Kota						200	150,000,000	300	250,000,000				500			500,000,000.00		
				Kajian tentang tingginya kekerasan terhadap perempuan		Kab/Kota						300	200,000,000	300	250,000,000				600			500,000,000.00		
				merumuskan kebijakan dari hasil Kajian		Dokumen						2	150,000,000	3	250,000,000				5			500,000,000.00		
				TOTAL					8,342,000,000		10,240,150,000		13,342,700,000		13,165,225,000		14,890,250,000				59,980,325,000			

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) ini disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2019. Kekurang-kekurangan yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan dan masalah serta kendala yang dihadapi akan ditindaklanjuti dan dicarikan solusi pemecahannya.

Demikian Rancangan Rencana Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, diharapkan Rancangan ini menjadi dasar perumusan dalam Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2019 melalui Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019.

Manado, Mei 2018


KEPALA DINAS
DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Ir. MIEKE PANGKONG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610519 108602 2 002